

POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PADA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DI PEMILU 2019

¹Dara Ayu Dwiyani, ²Dejehave Al Jannah, ³Benediktus Dalupe

¹Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial

ABSTRAK

Jurnal ini menguji pola rekrutmen calon legislatif DPRD DKI Jakarta di Pemilu 2019 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi dari penelitian sebelumnya bahwa, proses rekrutmen yang dilakukan partai politik belum sesuai dengan kaidah standarisasi. Selain itu terdapat dinasti politik dalam proses rekrutmen yang dilakukan, bahkan sebagian partai politik memilih calon legislatif hanya bermodalkan ketenaraan personal. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Konsep yang peneliti gunakan yaitu Teori Rekrutmen Politik yang dikemukakan oleh Philip Althof dan Michael Rush, yaitu seleksi melalui ujian atau pelatihan, penyortiran, rotasi atau giliran, perebutan kekuasaan, patronage, memunculkan pimpinan-pimpinan alamiah, dan koopsi. Lantas peneliti menemukan bahwa, pola rekrutmen yang diterapkan oleh PDI Perjuangan ialah pola rekrutmen terbuka. Terbuka dalam hal ini sumber rekrutmen berasal dari internal dan eksternal partai. Pola rekrutmen PDI Perjuangan menerapkan sistem "Berjenjang dan Kombinasi". Berdasarkan konsep penelitian, PDI Perjuangan terkonfirmasi menggunakan seleksi pemilihan dengan ujian dan pelatihan, penyortiran, rotasi dan giliran, memunculkan pimpinan-pimpinan alamiah dan koopsi. Namun terdapat dua konsep yang tidak diterapkan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen yaitu dengan cara perebutan kekuasaan, dan patronage. Output yang dihasilkan dari proses rekrutmen ini ialah DPD PDI Perjuangan mengutamakan sikap loyalitas dan dedikasi bagi bakal calon legislatif.

Kata Kunci : Rekrutmen Politik, Calon Legislatif, PDI Perjuangan

ABSTRACT

This journal examines the pattern of recruitment of legislative candidates for the DKI Jakarta DPRD in the 2019 election at the Indonesian Democratic Party of struggle. This study was conducted because there are indications from his previous research that the recruitment process carried out by political parties is not in accordance with the rules of standardization. In addition, there are political dynasties in the recruitment process, even some political parties choose legislative candidates only with personal fame. This study was conducted using descriptive qualitative research methods. The concept that researchers use is the theory of political recruitment proposed by Philip Althof and Michael Rush, namely selection through examination or training, sorting, rotation or turn, power struggle, patronage, giving rise to natural leaders, and coopsi. Then the researcher found that, the recruitment pattern applied by PDI Struggle's is an open recruitment pattern. Open in this case the sources of recruitment come from internal and external parties. PDI Struggle's recruitment pattern applies a system of "Tiered and Combination". Based on the research concept, PDI Struggle's was confirmed using selection selection with examination and training, sorting, rotation and turn, giving rise to natural leaders and cooperatives. However, there are two concepts that are not applied by PDI Struggle's in recruiting, namely by means of power struggle, and patronage. The Output generated from this recruitment process is DPD PDI Struggle's prioritizes loyalty and dedication for prospective legislative candidates.

Keywords: Political Recruitment, Legislative Candidates, PDI-P Party

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia. Sebagai negara dengan sistem demokrasi, keberadaan partai politik tidak dapat dipandang sebelah mata. Partai politik memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah partai sebagai sarana komunikasi politik, pendidikan politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik (Budiardjo, 2013). Dari keempat fungsinya penulis membahas mengenai partai politik sebagai sarana rekrutmen, dalam hal ini rekrutmen untuk mulai mencari anggota baru dan disiapkan sebagai calon-calon pemimpin baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Rekrutmen politik sendiri memiliki pengertian menurut Gabriel Almond adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melakukan penyeleksian kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui media komunikasi, menjadi anggota sebuah organisasi, mencalonkan diri untuk suatu jabatan tertentu, dengan cara pendidikan dan latihan (Labolo & Ilham, 2015). Proses rekrutmen menjadi sebuah gerbang keberhasilan partai dalam memenangkan sebuah pemilihan.

Indonesia mengalami rekrutmen politik saat Era Orde Baru sampai Reformasi mengalami pasang surut. Saat Era Reformasi yang terjadi hingga saat ini, timbul permasalahan baru dalam internal partai yaitu proses rekrutmen yang tidak prosedural, adanya perpecahan dalam tubuh struktur organisasi sampai ketidakpuasan antar anggota terhadap pemimpinnya (Sarwendah & Titin, 2014). Permasalahan dalam sistem perekrutan kader-kader partai politik di Indonesia memiliki berbagai macam tipe. Banyak nya bakal calon anggota legislatif melakukan pendekatan hubungan dengan orang-orang penting dalam tubuh partai. Munculnya isu ini bagi sebagian kalangan akan membangkitkan dinasti politik yang akan sangat bahaya bagi masa depan partai. (Sopian & Arianto, 2017).

PDI Perjuangan menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. PDI Perjuangan dibentuk pada tanggal 10 Januari 1973. Jati diri PDI Perjuangan adalah kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019, PDI Perjuangan menang di seluruh daerah pemilihan dengan mendapatkan 28 kursi. Prestasi lain dibuktikan oleh PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 berhasil meraih kursi terbanyak yaitu 25 kursi dengan total suara sebanyak 1.336.324 suara. Walaupun jumlah kursi yang didapatkan menurun dari periode sebelumnya, namun tetap menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang dan penguasa dalam 2 periode terakhir.

Dibalik keberhasilan PDI Perjuangan menjadi penguasa, terselip teka-teki mengenai proses rekrutmen yang dilakukan partai dengan lambang banteng bermoncong putih ini. Oleh

karena itu penelitian ini, berfokus pada kajian pola rekrutmen yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta sebagai proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif. Berdasarkan latar belakang, serta identifikasi masalah yang ada, penelitian ini hadir dengan rumusan masalah “*Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Pemilu 2019*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian menggunakan sumber informasi *purposive sampling*. Sumber informasi berjumlah 4 orang yaitu Gembong Warsono, S.IP., M.M sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, S.I.Kom sebagai Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, Widowati Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan, dan Arya sebagai kader PDI Perjuangan. Penelitian ini menggunakan beberapa informan yang mempunyai pemahaman dan berkaitan langsung dengan masalah penelitian, guna mendapatkan data yang lebih akurat. Selain itu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai visi-misi lembaga, program kerja, ruang lingkup lembaga secara luas, dan strategi rekrutmen politik. Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi DKI Jakarta, yang bertempat di Jl. Tebet Raya No. 46, RT 4 RW 4, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820.

Langkah dalam teknik analisa data menurut teori Miles dan Huberman (Milles & Huberman, 1992) terdapat 4 langkah, yaitu data *collecting* (pengumpulan data), data *reduction* (reduksi data), data *disply* (penyajian data), dan klafisikasi Data (penarikan kesimpulan dan klarifikasi). Teknik pengumpulan data yang digunakan di lapangan adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan kepercayaan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dalam menganalisis data dan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data berupa uji kredibilitas/kepercayaan, teknik memeriksa keteralihan data, dan teknik memeriksa kebergantungan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa DPD PDI Perjuangan terbukti menggunakan 5 (lima) dari 7 (tujuh) konsep Teori Rekrutmen Politik yang dikemukakan oleh Philip Althof dan Michael Rush dalam merekrut Caleg DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2019, yaitu :

1) Seleksi Pemilihan dengan Ujian atau Pelatihan

Sistem rekrutmen kader melalui ujian atau pelatihan. Ujian atau pelatihan sangat bermanfaat bagi sumber daya manusia (SDM). DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menerapkan pola rekrutmen “Berjenjang”, berjenjang disini bakal calon harus mengikuti semua tahapan sekolah yang partai sediakan. Adapun sekolah partai terklasifikasi menjadi tiga sekolah, yaitu sekolah kader biasa, sekolah legislatif, dan sekolah kepala daerah.

2) Sistem Seleksi Melalui Penyortiran

Bentuk sistem penyortiran yang dilakukan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta adalah melakukan penyortiran berdasarkan kelengkapan berkas pendukung saat pendaftaran.

3) Seleksi Melalui Rotasi atau Giliran

DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta juga menerapkan sistem rotasi atau giliran, hal ini terbukti karena salah satu pola rekrutmen PDI Perjuangan adalah “Kombinasi”. Kombinasi dari segi usia, suku, agama, dan *gander* antara kader yang membangun partai dengan kader baru, sehingga menimbulkan sinergitas, loyalitas, dan pola pikir yang lebih segar sehingga dapat bertukar ide serta gagasan untuk tujuan bersama. Dewan Pimpinan Pusat memberikan hak otonomi untuk para Dewan Pimpinan Partai baik di tingkat Provinsi (DPD) maupun Kabupaten/Kota (DPC) untuk melakukan seleksi sumber daya manusia yang berada didaerah tersebut. Selain itu juga dapat memberikan peluang kepada seluruh kader tanpa terkecuali untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

4) Seleksi dengan Memunculkan Pimpinan-Pimpinan Alamiah

Sumber daya manusia (SDM) adalah sebuah faktor penting dalam pencapaian sebuah organisasi. Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh organisasi salah satunya adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai kreatifitas tinggi, dan inovatif. Maka dari itu DPD PDI Perjuangan menerapkan seleksi alamiah. PDI Perjuangan memiliki badan partai, dan sayap partai. PDI Perjuangan membebaskan para kader untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya.

5) Seleksi Melalui Koopsi

Proses koopsi secara garis besar pemimpin-pemimpin dalam struktur kepengurusan bebas untuk memilih kandidat yang akan di rekrut. Contoh nyata dari sistem seleksi koopsi yang diterapkan oleh PDI Perjuangan adalah perekrutan calon anggota legislatif yang berasal dari *vote gatters* atau memiliki daya tarik untuk medapat dukungan masyarakat. *Vote gatters*

berasal dari beberapa tokoh seperti tokoh agama, akademisi, professor, aktivis, dan pekerja seni.

Sedangkan 2 (dua) bentuk sistem rekrutmen yang tidak diterapkan oleh PDI Perjuangan adalah seleksi melalui perebutan kekuasaan, dan seleksi dengan cara *patronage*.

- **Pola Rekrutmen Calon Legislatif PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta 2019-2024.**

Pola rekrutmen yang diterapkan oleh DPD PDI Perjuangan dalam merekrut calon anggota legislatif berdasar beberapa langkah. Sebagai berikut :

Pada langkah pertama, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta membuka pendaftaran dan menyiapkan formulir berjumlah 25 lembar di masing-masing daerah pemilihan. Ketersediaan formulir disesuaikan dengan batas maksimal kepengurusan dimasing-masing Dewan Pimpinan Partai. Pada tahap ini pendaftar harus mengisi formulir secara sebenar-benarnya dan melampirkan berkas pendukung. Proses pendaftaran Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2019 dibuka selama 2 minggu. Setelah proses pendaftaran ditutup, Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) sebagai pihak yang berwenang melakukan rekrutmen caleg mengumumkan nama-nama dan mengklafisikasikan bacaleg kedalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Langkah selanjutnya, pada tahapan tes kesehatan jiwa, nama-nama DCS akan menjalani suatu tes kesehatan jiwa oleh Psikolog. Tes ini bertujuan untuk mengetahui penilaian karakteristik kejiwaan DCS, misalnya adanya gangguan mental, gangguan perasaan, dan gangguan kepribadian. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi bersama, maka didapati hasil nama-nama DCS yang lolos tahap ke-2 ini. Dari Daftar Calon Sementara berubah menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Legislatif Periode 2019-2024 PDI Perjuangan Se-Provinsi DKI Jakarta. Jumlah Daftar Calon Tetap disesuaikan dengan ketersediaan kursi di DPRD.

Langkah selanjutnya, DCT yang lolos seleksi Kesehatan oleh psikolog akan menjalani 2 sekolah yaitu Sekolah Partai, dan Sekolah Legislatif. Masing-masing sekolah ditempuh dalam waktu 2 minggu. PDI Perjuangan sangat menginginkan kader yang menduduki jabatan publik memiliki kualitas yang baik, memiliki integritas tinggi, dan loyalitasnya kepada partai dan kepada masyarakat pendukung nya.

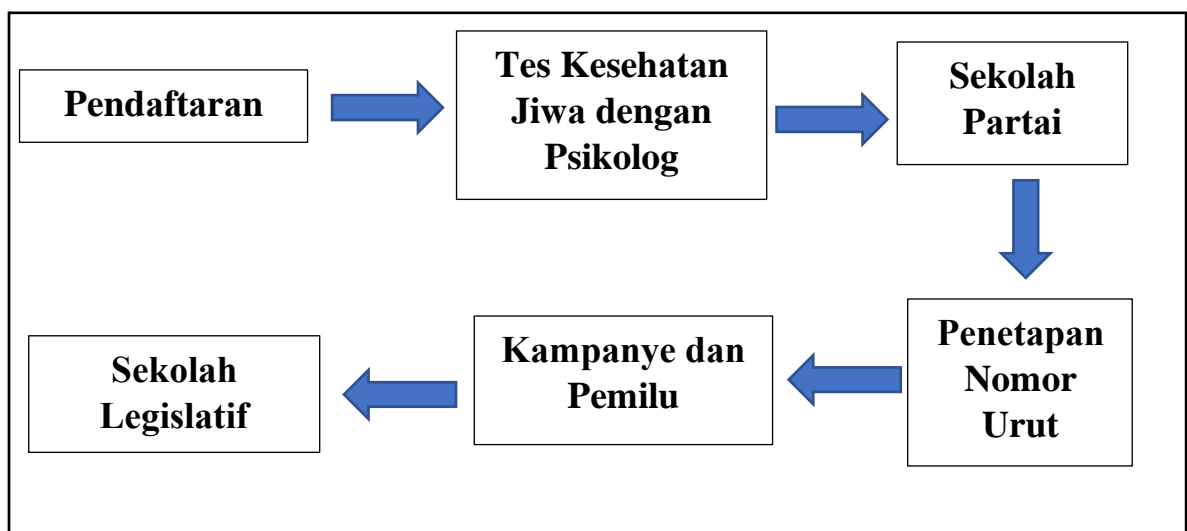
Langkah selanjutnya, nomor urut di surat suara dalam pemilihan umum masih dianggap hal penting bagi calon legislatif. Kebanyakan bacaleg menganggap bahwa nomor urut sebagai penentu kemenangan. Penetapan nomor urut yang diterapkan oleh DPD PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif DPRD DKI Jakarta Tahun 2019 dilihat dari berbagai aspek, seperti :

- 1) Pengurus Inti dalam Struktural Partai. Kader yang menduduki jabatan dalam struktural Dewan Pimpinan Partai baik DPD dan DPC akan menjadi tolak ukur, karena DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta melihat loyalitas dari kandidat.
- 2) Calon Legislatif Pertahanan. Caleg pertahanan dianggap sudah memiliki nama dan pengalaman dalam bidang politik dan pemerintahan. Selain memiliki nama dan pengalaman, nama caleg pertahanan ini memiliki prestasi dalam periode sebelumnya sehingga dianggap mudah dan dapat menarik dukungan dari masyarakat.
- 3) Kombinasi. Kombinasinya antara kader partai dengan vote getters. Dalam hal ini DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta memasukkan unsur vote getters atau sosok-sosok yang dapat menarik dukungan dari masyarakat. Selain itu bacaleg perempuan dan laki-laki agar memberikan variasi sehingga terlihat tidak monoton.

Tahap terakhir yaitu Kampanye dan Pemilu. DPD PDI Perjuangan memberikan kebebasan bagi seluruh bacaleg untuk kampanye menggunakan berbagai macam metode. Walaupun diberi kebebasan namun proses kampanye yang dilakukan tetap diamati oleh partai. Masa kampanye bacaleg selama kurun waktu 23 September 2018 hingga 13 April 2019 atau selama 5 bulan. Setelah melewati tahap kampanye selama 5 bulan, 17 April 2019 diselenggarakanlah sebuah pesta demokrasi terbesar serentak di Indonesia yaitu Pemilihan Umum 2019. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi suara sah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih. Dalam Pemilu Serentak 2019, PDI Perjuangan berhasil meraih kursi tertinggi sebanyak 25 kursi dengan total 1.336.324 suara.

Penjelasan diatas penulis rangkum melalui bagan dibawah ini :

Bagan 1. Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta Pada Pemilu 2019



Peneliti menemukan *ouput* dari rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil penelitian tipe kandidat anggota legislatif PDI Perjuangan dalam Pemilu 2019 adalah loyalis partai (*party loyalist*) dengan presentase sebesar 56%. Hal ini dibuktikan pada saat pembagian nomor urut calon legislatif, terdapat 14 nama-nama bacaleg yang menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dari struktural kepengurusan mulai dari DPD, DPC, dan pengurus ranting. Seperti diketahui bersama DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menjanjikan adanya hak istimewa dalam hal pembagian nomor urut jika bacaleg memiliki loyalitas dan menduduki jabatan dalam struktural partai. Selain ke-14 nama bacaleg yang berasal dari struktural partai, 11 nama lain nya berasal dari sistem kombinasi antara kader partai, *vote gatter*, dan golongan perempuan.

Sumber rekrutmen DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta berasal dari internal dan eksternal partai. Namun hal ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang telah disepakati dalam organisasi. Pada dasarnya sistem rekrutmen yang dilakukan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta terbuka untuk internal partai dan terbuka untuk umum, yang dimana hal ini dapat memberikan kesempatan dan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Namun presentase bakal calon internal partai lebih besar, hal ini beralasan karena DPD PDI Perjuangan menghargai loyalitas dari para kader nya.

Berdasarkan *ouput* peneliti mendapati hasil kriteria rekrutmen yang dielaborasi dengan kriteria pemilih, yaitu usia dan pendidikan

1) Usia

Rentang usia calon anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan terpilih berkisar 25-60 tahun, yang menurut peneliti usia tersebut dapat digolongkan usia emas karena memiliki pengalaman dan pemikiran analisis yang matang. Sementara untuk 60-85 tahun hanya mendapatkan presentase 12%. Jadi dapat disimpulkan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menerapkan pola kombinasi dalam aspek usia calon anggota legislatifnya.

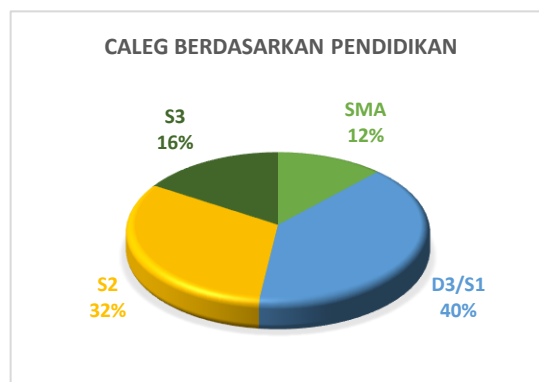
Diagram 1. Presentase Calon Legislatif Berdasarkan Usia



2) Pendidikan

Rentang tingkat pendidikan calon anggota legislatif menyebar dari SLTA sampai S3. Rata-rata persentase pendidikan terbanyak tingkat D3/ S1 dengan presentase 40% dan disusul oleh S2 sebanyak 32%. Proses rekrutmen yang dilakukan DPD PDI Perjuangan dilakukan secara terbuka bagi siapa saja yang ingin mencalonkan diri tanpa memandang tingkat pendidikan. Namun berdasarkan hasil wawancara, tingkat pendidikan dari bacaleg juga mempengaruhi dukungan. Seperti diketahui bersama pola pikir masyarakat mengenai pendidikan masih sangat tinggi, sebab masyarakat beranggapan kebanyakan orang yang memiliki pendidikan tinggi pasti memiliki tingkat intelektual yang bagus sehingga cocok menjadi wakil rakyat.

Diagram 2. Presentase Caleg DPRD DKI Jakarta Berdasarkan Pendidikan



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola rekrutmen yang diterapkan oleh PDI Perjuangan ialah pola rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen PDI Perjuangan menerapkan sistem “Berjenjang dan Kombinasi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa PDI Perjuangan menggunakan lima dari tujuh konsep Teori Rekrutmen Politik dari Philip Althof dan Michael Rush, yaitu seleksi pemilihan dengan ujian dan pelatihan, penyortiran, rotasi dan giliran, memunculkan pimpinan-pimpinan alamiah dan koopsi. Namun terdapat dua konsep yang tidak diterapkan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen yaitu dengan cara perebutan kekuasaan, dan *patronage*

Saran pada penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta harus lebih memperjelas bahwa pola rekrutmen kader biasa dan kader bakal calon anggota legislatif terbuka untuk seluruh masyarakat. Selain itu perlu adanya pembenahan dalam sistem promosi melalui sosial media. Promosi dan literasi digital di media sosial sangat penting karena saat ini sudah memasuki era revolusi industry 4.0 yang berbasis digital. Sementara bagi

pemilihan calon anggota legislatif harus dilakukan secara terbuka, masih banyak masyarakat yang belum memahami proses rekrutmen dari partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2015). Fusi partai-partai islam menjadi ppp pada masa orde baru (1971-1973). *Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.*
- Ariwibowo, H. (2013). Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- Berek, P. Y., & Yonathan, M. M. (2019). Pola Rekrutmen Calon DPRD Partai Politik Persatuan Indonesia (PERINDO) Dalam Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Poros Politik.*
- Budiardjo, M. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik. *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.*
- Gayo, Alamsyah M. (2014). Pemilu Legislatif 2014 Beberapa Catatan Kritis. *Jurnal Demokrasi Edisi 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* , 71-84.
- Gayo, Alamsyah M. (2014). Pemilu Legislatif 2014 Beberapa Catatan Kritis. *Jurnal Demokrasi Edisi 2014 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* , 71-84.
- Hamid, A. F. (2008). Partai Politik Lokal Di Aceh.
- Ihyauddin. (2012). Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera & Partai Demokrat). *Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.*
- Indonesia, C. (2019, 8 08). Pahit Manis Sejarah Politik PDI Perjuangan. *Diambil kembali dari CNN Indonesia: www.cnnindonesia.com (diakses pada 1 November 2021, pukul 13.00)*
- Iswari, F. (2019). Arti Penting Organisasi Sayap Partai Politik Serta Hubungannya Dengan Partai Politik DI Indonesia . *Call For Paper FH UII*, 4.
- Kristiyanto, H. (2019-2024). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan . *Jakarta.*
- Kusumaningsih, A. (n.d.). Sejarah Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). *Retrieved from Sejarah Lengkap Web site: <https://sejarahlengkap.com>*
- Milles, & Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif . *Jakarta: Universitas Indonesia Press.*
- Neumann, S. (1963). Modern Political Parties. *London: 1963.*
- Prabowo, M. P. (n.d.). Visi Misi Partai. *Retrieved from PDI Perjuangan Web Site: <https://www.pdiperjuangan.id>*

- Pamungkas, S. (2012). Partai Politik Teori dan Praktik Di Indonesia. *Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.*
- Rush, M. (1992). Politics and Society : An Introduction to Political Sociology. *Harvest Wheatsheap.*
- Rush, M., & Althoff, P. (2020). Pengantar Sosiologi Politik (edisi terbaru). *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Ruslan, M., & Niron, E. S. (2020). Demokrasi Dan Transparansi Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Rekrutmen Caleg Pada Pemilu 2019. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 129-136.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta.*
- Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik . *Jakarta: Gramedia Widiasarana.*
- Suantra, I. N., & Nurmawati, M. (2019). Bahan Ajae Partai Politik dan Pemilihan Umum. *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*, 9-10.
- Sadat, A. (2017). Perbandingan Sistem Politik Pemerintahan. *Deepublish.*
- Sani, A. F., & Budiman, A. (2020, 09 27). Pengamat Sebut Popularitas Harus Tinggi Jika Ingin Menang di Pilkada. *Retrieved from Nasional Tempo: <https://nasional.tempo.com> (diakses pada 5 November 2021, pukul 23.00)*
- Toni, d. P. (2019). Mengenal Teori-Teori Poliitk Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. *Bandung: Nuansa Cendekia.*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemilu